

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai perspektif *Political Justice* di dalam Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya sudah memenuhi *Political Justice* dan implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya memadai sebagai bentuk *political justice*.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan positivis karena untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai berbagai fakta sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif karena menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan nara sumber meliputi: Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya, Lurah, Masyarakat penerima BPJS PBI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi *Political Justice*, berdasarkan indikator *fairness*, pemerataan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan. Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya juga belum memadai sebagai bentuk *political justice* karena negara masih menetapkan keadilan pada batasan untung dan rugi terhadap kesehatan karena cara berpikirnya terletak pada besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktual. Oleh karena itu, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya belum memenuhi konsep *Political Justice*. Hal ini terlihat bahwa penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya, mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali pakai, dan masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan.

Kata Kunci: *Political Justice*, Politik Kesehatan, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This research is about the perspective of Political Justice in the Implementation of BPJS PBI in Surabaya. The study aims to determine the implementation of BPJS PBI in Surabaya has fulfilled Political Justice and the implementation of BPJS PBI in Surabaya is adequate as a form of political justice.

This research method uses qualitative research with a positivist approach due to achieving a deep and comprehensive understanding of various social facts. The method used is descriptive because it presents a picture of the situation or social phenomenon in detail. Methods of data collection using direct interviews with resource persons include: Head of Surabaya City Health Office, Surabaya City DPRD Commission D, Lurah, PBJS recipient community.

The results showed that the implementation of BPJS PBI in Surabaya City had not yet fulfilled Political Justice, based on indicators of fairness, equality, equality, and impartiality. The implementation of BPJS PBI in the city of Surabaya is also inadequate as a form of political justice because the state still determines justice in terms of profit and loss to health because the way of thinking lies in the amount of current contributions that do not match the actual calculation. Therefore, the implementation of the Health Insurance for the Poor program funded by the Surabaya City Regional Budget has not yet fulfilled the concept of Political Justice. This can be seen that there are still Health Insurance recipients who are not on target because of lack of accuracy in the process of verifying data on the poor in Surabaya, easy to get a Poor Certificate (SKM) that applies only once, and there are still groups of welfare recipients, so there is no meet the aspects of equity and justice.

Keywords: *Political Justice, Politics of Health, Impelemntasi Policy*